



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN UTAMA
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT PERENCANAAN STRATEGIS PEMBANGKITAN
3. NHK : 205034

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.367.882.000

1. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 188.552.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/129 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.434.000.000
3. Bangunan Seluas 27.75 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 685.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/106 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.423.000.000
5. Bangunan Seluas 7.5 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 637.330.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.300.000.000

1. MOBIL, NISSAN X-TRAIL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 429.000.000**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.042.095.589**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 9.138.977.589



III. HUTANG

Rp. 1.039.423.681

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.099.553.908

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.